

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Melalui pemaparan hasil analisis data serta interpretasi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sejumlah kesimpulan penting dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Meskipun nilai rata-rata tanggapan responden terhadap indikator akuntabilitas tergolong tinggi, secara statistik pengaruhnya tidak terbukti signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Kemungkinan ini disebabkan karena mekanisme pertanggungjawaban yang sudah dilakukan belum terintegrasi sepenuhnya dengan proses pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan secara teknis.
2. Transparansi juga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa. Meskipun secara deskriptif responden menilai adanya keterbukaan informasi yang cukup baik dari pemerintah desa, namun pengaruhnya belum cukup kuat untuk memengaruhi pengelolaan keuangan secara langsung. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa meskipun informasi tersedia, aksesibilitas dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan keuangan belum optimal atau belum terintegrasi dengan sistem pengelolaan secara menyeluruh.
3. Pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi secara signifikan oleh keberadaan sistem akuntansi keuangan desa. Dengan nilai signifikansi yang sangat kecil dan koefisien yang tinggi, sistem akuntansi menjadi faktor dominan dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar sangat berperan penting dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

4. Akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntansi keuangan desa memiliki peran penting dan saling berkaitan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif. Pengelolaan keuangan desa dipengaruhi secara signifikan oleh ketiga variabel tersebut secara bersamaan, dengan kontribusi sebesar 82,8% terhadap variasi yang terjadi. Temuan ini mendukung teori agensi, yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol untuk mencegah penyimpangan akibat asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi tidak akan efektif tanpa adanya sistem akuntansi yang baik, dan sebaliknya, sistem akuntansi membutuhkan dukungan budaya organisasi yang menjunjung keterbukaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, agar dapat meningkatkan efektivitas tata kelola serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini dapat peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah desa di Kecamatan Pelayung disarankan untuk tidak hanya menjalankan akuntabilitas dan transparansi secara administratif, tetapi perlu melakukan transformasi ke arah partisipatif dan edukatif. Ini dapat dilakukan dengan membangun forum musyawarah desa secara rutin, memanfaatkan teknologi informasi desa (website, media sosial, atau aplikasi sederhana), serta menyusun laporan yang tidak hanya legal formal tetapi juga mudah dipahami oleh warga. Literasi keuangan masyarakat harus menjadi bagian dari kebijakan desa, agar akuntabilitas dan transparansi benar-benar berdampak pada penguatan kontrol sosial dan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.
2. Mengingat sistem akuntansi keuangan desa terbukti sebagai faktor paling signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa, maka desa perlu menjadikan penguatan sistem akuntansi sebagai strategi transformasi manajemen keuangan desa. Pemerintah desa dapat menggagas program pelatihan akuntansi digital bagi perangkat desa, mengadopsi sistem informasi

keuangan berbasis aplikasi sederhana (misalnya berbasis Excel atau platform desa online), serta membangun bank data keuangan desa yang terbuka dan terintegrasi. Dengan sistem yang efektif dan terstandarisasi, pengelolaan keuangan desa akan lebih profesional, efisien, dan adaptif terhadap tantangan ke depan.

3. Lembaga seperti Inspektorat Daerah, Pendamping Desa, dan BPKP disarankan untuk melakukan pendekatan kolaboratif dan pembinaan aktif, bukan semata-mata pengawasan administratif. Pendampingan berbasis transformasi ini dapat mencakup coaching teknis, penilaian kinerja berbasis indikator transparansi dan partisipasi, serta evaluasi kualitatif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Dengan pendekatan ini, desa tidak hanya dinilai secara kaku, tetapi juga dibina untuk tumbuh menjadi entitas yang mandiri dan bertanggung jawab secara finansial dan sosial.
4. Penelitian ini terbatas pada tiga variabel utama, sehingga untuk menciptakan peta yang lebih komprehensif terhadap pengelolaan keuangan desa, peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel baru, seperti partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, pengawasan internal, integritas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan memperluas variabel kajian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang lebih kuat untuk mendukung transformasi pengelolaan keuangan desa ke arah yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.